

FLYPAPER EFFECT PADA PENGARUH TRANSFER TIDAK
BERSYARAT DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN TAHUN 2007-2010

Hernawan Bayu Purnomo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Transfer Tidak Bersyarat dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan mengetahui kemungkinan terjadinya flypaper effect di Kabupaten/Kota di Kalimantan Tahun 2007-2010. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 35 kabupaten dan 10 kota yang ada di Kalimantan. Estimasi dilakukan dengan panel regresi dengan menggunakan program *evIEWS-7*. Hasil dari penelitian ini, pertama menunjukkan bahwa Transfer Tidak Bersyarat dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, terjadinya Flypaper Effect di kabupaten/Kota di Kalimantan yang ditunjukkan oleh nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah yang lebih kecil dari nilai koefisien dari Transfer Tidak Bersyarat.

Kata kunci : *flypaper effect, transfer tidak bersyarat, pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi daerah.*

Pendahuluan

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan perwujudan desentralisasi di Indonesia, tentu perlu adanya dana sebagai keperluan penunjang. Menurut UU No.32 Tahun 2004, bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransferkan dana perimbangan pada Pemerintah Daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian daerah bagi hasil pajak pusat. Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Kesit, 2004).

Dalam pelaksanaan desentralisasi, peran transfer tidak dapat dihindarkan mengingat otonomi yang dilimpahkan menuntut daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Bagi pemerintah pusat, transfer memang diusahakan menjadi pendorong agar pemerintah daerah secara intensif menggali sumber-sumber penerimaan sesuai kewenangannya. Sayangnya, alokasi transfer di negara-negara sedang berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi

kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal (Naganathan dan Sivagnanam, 1999). Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat (Shah, 1994), bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal (Oates, 1999).

Keadaan tersebut juga ditemui pada kasus pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia. Transfer Pemerintah Pusat khususnya yang didominasi oleh transfer tidak bersyarat yaitu DAU dan DBH juga masih sangat berpengaruh dalam pembiayaan pembangunan yang ada di Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan. Hal ini terlihat dari besarnya porsi penerimaan Transfer Tidak Bersyarat pada gambar 1 yang diperoleh daerah di Kabupaten/Kota di Kalimantan pada tahun 2010 daripada sumber penerimaan lainnya seperti, Transfer Bersyarat, PAD atau pendapatan lain-lain.

Gambar 1
Perbandingan Unsur dalam Pendapatan Daerah
Kabupaten/Kota di Kalimantan Tahun 2010



Sumber data : BPS, data statistik keuangan Kab/Kota di Indonesia 2007-2010 (data diolah)

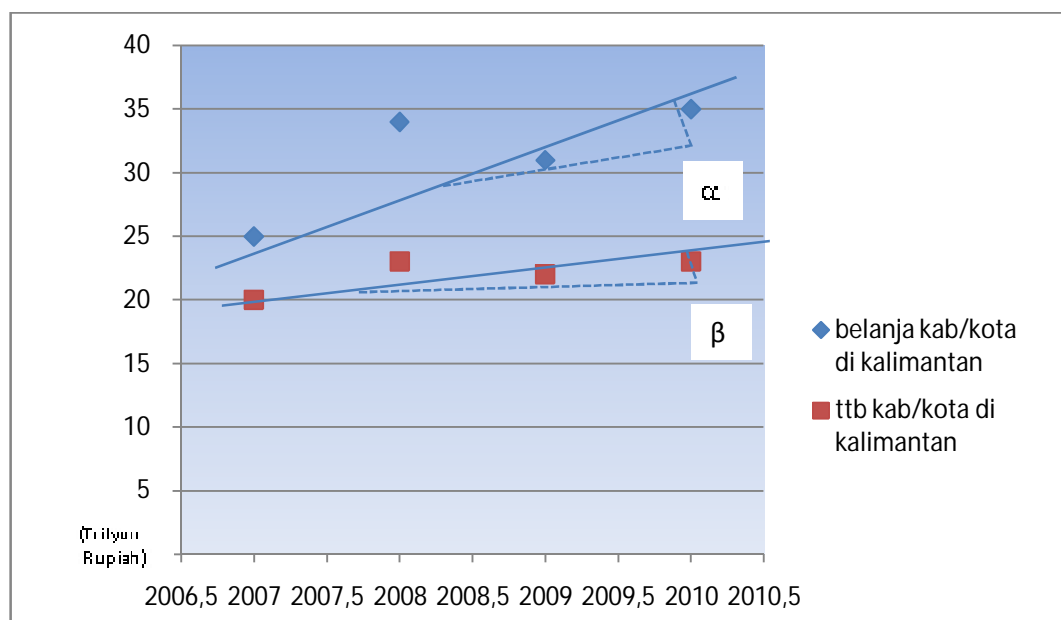
Sementara PAD yang diharapkan dapat digali secara maksimal dan mampu menunjang kemandirian keuangan daerah dengan potensi yang dimiliki daerah-daerah tersebut kenyataannya masih jauh untuk dapat terlaksana. Menurut Haryo Kuncoro (2004:26) pada beberapa kasus pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu membiayai belanja Pemerintah Daerah paling tinggi sebesar 20% baik pada era sebelum maupun sesudah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Adanya belanja atau pengeluaran pemerintah yang distimulus oleh penerimaan daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah dapat memberikan efek multiplier

yang dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun perlu dicermati kemungkinan adanya *flypaper effect*, yaitu bila transfer Pemerintah Pusat lebih kuat memstimulus Pengeluaran Pemerintah Daerah ketimbang pendapatan daerah yang dihasilkan sendiri (PAD) untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Indikasi adanya *flypaper effect* tersebut nampaknya juga terjadi pada Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan. Ini terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2
Perbandingan Laju Pertumbuhan Belanja dan Pertumbuhan TTB
Kabupaten/Kota di Kalimantan Tahun 2007-2010



Sumber data : BPS, data statistik keuangan Kab/Kota di Indonesia 2007-2010 (data diolah)

Gambar 2 menunjukkan bahwa tangen α lebih besar dari tangen β , dimana artinya bahwa laju pertumbuhan belanja daerah lebih besar daripada laju pertumbuhan penerimaan dana transfer tidak bersyarat. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya gejala *flypaper effect* yang memperlihatkan adanya peningkatan alokasi transfer dengan diikuti oleh pertumbuhan belanja yang lebih tinggi.

Disampaikan Turnbull (1998) bahwa indikasi peningkatan belanja yang tinggi tersebut disebabkan karena *inefisiensi* belanja pemerintah daerah. Gejala ini menunjukkan bahwa birokrat pemerintah daerah bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima dari pusat.

Pelaksanaan transfer dana desentralisasi fiskal yang diamanatkan Undang-undang otonomi daerah adalah dipergunakan untuk membangun sarana dan prasarana publik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Melihat kenyataan bahwa Transfer Tidak Bersyarat (TTB) menjadi sumber dana utama dalam menunjang pembiayaan pembangunan yang ada di Kabupaten/Kota di Kalimantan, TTB diharapkan dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang membawa peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Teori Transfer

Rosen (2002), membagi jenis grant menjadi 2 macam yaitu *conditional grant* atau *categorical grant* dan *unconditional grant*. *Conditional grant* adalah transfer khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk tujuan khusus, misalnya untuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Jadi *conditional grant* serupa dengan *matching grant*. *Unconditional grant* diberikan kepada pemerintah daerah tanpa persyaratan tertentu dan pada umumnya berkaitan dengan usaha-usaha produktif untuk investasi pada badan usaha. Sering juga *unconditional grant* disebut *revenue sharing*.

Menurut (Azwardi, 2007), transfer tidak bersyarat (*unconditional grants*) di Indonesia adalah dalam bentuk Dana Alokasi Umum atau DAU dan Dana Bagi Hasil atau DBH, sedangkan transfer bersyarat (*conditional grants*) berupa Dana Alokasi Khusus atau DAK.

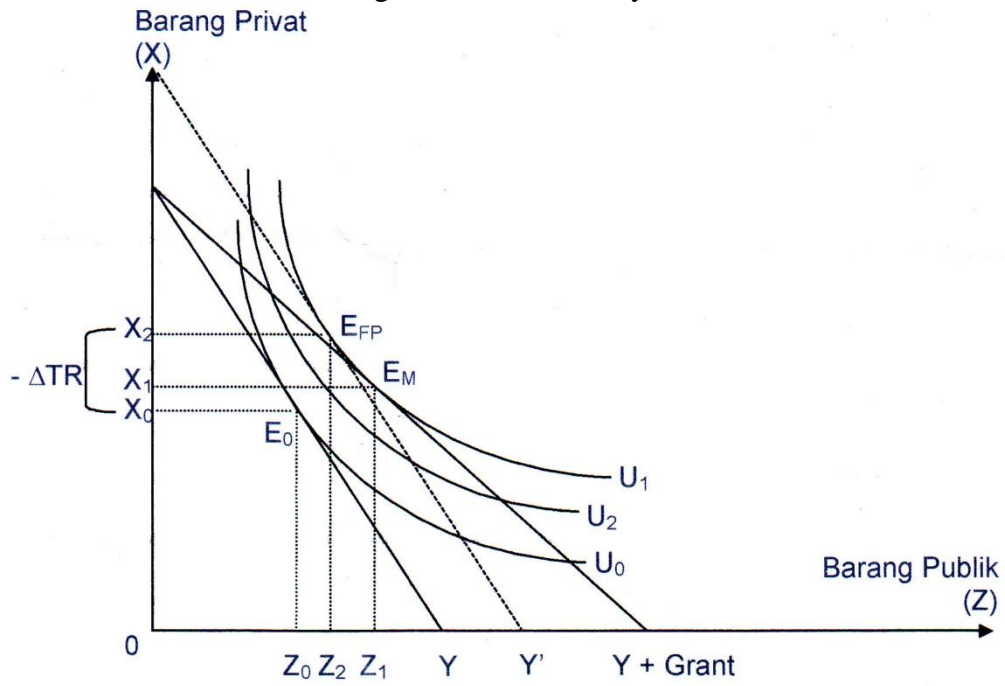
Wilde (1968) dalam Haryo (2007) mempelopori analisis transfer tidak bersyarat dan transfer bersyarat pada kendala anggaran dan kurva indiferensi. Transfer tidak bersyarat (*unconditional grants*) dapat dijelaskan melalui pendekatan teori perilaku konsumen. Transfer ini memiliki tujuan terjadinya peningkatan pembangunan daerah yang tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatannya.

Transfer tidak bersyarat memiliki sifat apabila ada tekanan fiskal pada basis pajak lokal akan menurun yang kemudian menyebabkan penerimaan pajak juga mengalami penurunan, selain itu pengeluaran konsumsi barang publik tetap meningkat. Hal ini berarti transfer akan mengurangi beban pajak masyarakat sehingga pemerintah daerah tidak perlu menaikkan pajak untuk membiayai penyediaan barang publik. Oleh karena itu dalam konsep ini dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam penyediaan barang publik tidak akan berbeda sebagai akibat dari penurunan pajak daerah atau kenaikan transfer.

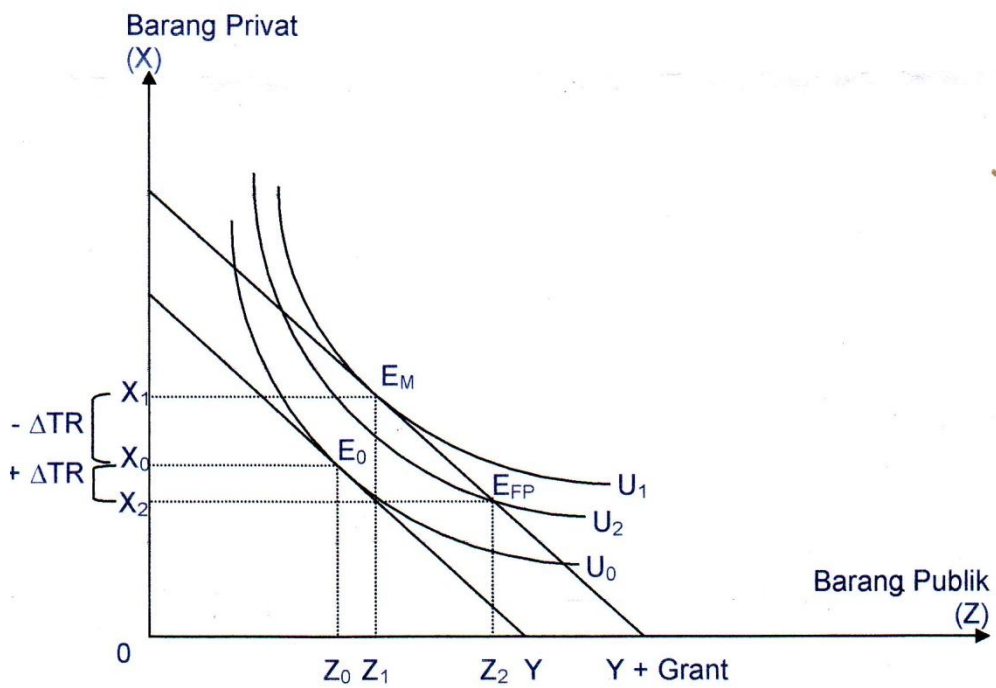
Dalam hal bantuan tak bersyarat ini, Para peneliti menemukan keseimbangan masyarakat setelah menerima transfer berada pada titik E_{FP} (bukannya pada E_M) yang menunjukkan kenaikan penerimaan pajak daerah ($+\Delta TR$) dan juga kenaikan konsumsi barang publik (dari Z_1 menjadi Z_2). Ini berarti transfer meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi tidak menjadi substitusi bagi pajak daerah.

Sementara, Transfer bersyarat (*conditional grants*) berpengaruh pada konsumsi barang privat melalui efek harga. Dengan transfer, pemerintah memberikan subsidi untuk setiap unit barang publik sehingga akan menurunkan harga barang publik yang menyebabkan konsumsi barang publik mengalami peningkatan dari yang semula Z_0 menjadi sebesar Z_1 .

Gambar 3
Pengaruh Transfer Bersyarat



Gambar 4
Pengaruh Transfer Tak Bersyarat



Sumber : Haryo Kuncoro, Simposium Nasional Akuntansi X Makassar. 2007

Teori Pengeluaran Pemerintah

1. Pengeluaran Pemerintah Versi Keynes

Identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G$ merupakan pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan Pemerintah dalam perekonomian tertutup. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan pengeluaran konsumsi, dan G merupakan Pengeluaran Pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi Pengeluaran Pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1997).

Menurut Keynes untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pengeluaran Pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional sehingga dapat mengimbangi kecenderungan mengkonsumsi (C) dalam perekonomian.

2. Teori Wagner

Wagner menyatakan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran Pemerintah akan meningkat. Terutama disebabkan karena Pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori yang menganggap Pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dengan masyarakat yang lain. Menurut Wagner, ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran Pemerintah selalu meningkat yaitu :

- Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan
- Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat
- Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi
- Perkembangan demografi
- Ketidakefisienan birokrasi

Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antar industri dan hubungan antar industri dengan masyarakat akan semakin kompleks sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif menjadi semakin besar.

3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah.

Dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin meningkat pula. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang menjadi semakin besar juga.

Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lagi untuk kegiatan pembangunan diberbagai jenis infrastruktur yang penting. Anggaran-anggaran tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi.

Teori pertumbuhan ekonomi

1. Konsep pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi yang terjadi atau tidak (arsyad, 2004:13).

Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2007:4), ada perbedaan dalam istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk.

2. PDRB

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2002:3) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Cara penyajian PDRB dilakukan sebagai berikut:

- 1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai PDRB.
- 2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan, yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi.

Flypaper effect

Istilah Flypaper effect diperkenalkan pertama kali oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1979) untuk mengartikulasikan pemikiran Arthur Okun (1930) yang menyatakan "*money sticks where it hits*". Sejauh ini, belum ada padanan kata "*flypaper effect*" dalam bahasa Indonesia sehingga kata ini dituliskan sebagaimana adanya tanpa diterjemahkan

dalam (Irham, 2011) dikatakan bahwa *flypaper effect* merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (*unconditional grants*) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah.

Ada dua model terkait dengan *flypaper effect*, yaitu:

- 1) Model Birokratik
- 2) Model Ilusi Fiskal

Model birokratik dan ilusi fiskal pada prinsipnya menawarkan penjelasan mengenai sebab dan kronologi terjadinya selisih anggaran. Perbedaan yang paling mendasar antara model birokratik dan model ilusi fiskal adalah terletak pada sudut pandang analisisnya. Model birokratik, di satu sisi menelaah terjadinya perbedaan anggaran dengan mengambil sudut pandang dari perilaku para birokrat di daerah, sedangkan model ilusi fiskal, di sisi yang lain mendasarkan kajiannya dari sudut

pandang perilaku masyarakat setempat dalam menyikapi keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerah.

Metode Penelitian

Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah data dari 45 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Kalimantan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta data lain seperti data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), data populasi dan data Angkatan Kerja Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Kalimantan untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitis* yang menggambarkan Pengaruh Transfer Tidak Bersyarat (TTB) sebagai Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan.

Model Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan model linier. Alat analisis yang digunakan yaitu model regresi panel data (*panel data regression model*).

Persamaan model adalah sebagai berikut :

1. Untuk melihat ukuran besaran elastisitas/respon belanja daerah terhadap Transfer Tidak Bersyarat pemerintah pusat dan PAD :

$$\ln Git = \alpha + \beta_1 \ln PAD_{it} + \beta_2 \ln TTB_{it} + \beta_3 \ln POP_{it} + u_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana: G: Belanja Daerah, α : Konstanta, PAD: Pendapatan Asli Daerah, TTB: Transfer Tidak Bersyarat Pemerintah Pusat, POP: Populasi/Jumlah Penduduk, β_1 , β_2 dan β_3 : Koefisien Regresi, u_{it} : error term, i: Kabupaten/Kota, t: Waktu.

2. Untuk melihat pengaruh PAD dan Transfer Tidak Bersyarat Pemerintah Pusat terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, dengan mengadopsi dan memodifikasi model dari Amin Pujiati (2006), pada model persamaan sebagai berikut:

$$\ln Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln PAD_{it} + \alpha_2 \ln TTB_{it} + \alpha_3 \ln TB_{it} + \alpha_4 \ln AK_{it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana: Y: Pertumbuhan PDRB, R_{it} : PAD: Pendapatan Asli Daerah, TTB: Transfer Tidak Bersyarat Pemerintah Pusat, TB: Transfer Bersyarat Pemerintah Pusat, AK: Angkatan Kerja, α_0 : Konstanta, α_1 , α_2 dan α_3 : Koefisien Regresi, ϵ_{it} : error term, i: Kabupaten/Kota, t: Waktu.

Hasil dan Pembahasan

Estimasi Model

Model Pengaruh Transfer Tidak Bersyarat, PAD dan Populasi terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tahun 2007-2010

Dalam analisis regresi yang menggunakan data panel, ada dua metode yang digunakan untuk menentukan model, yaitu : *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*.

Menurut Judge dalam Gujarati (2003) yang mengungkapkan bahwa jika yakin secara individu, atau secara *cross section* satuan pada sampel penelitian bukanlah gambaran dari random dari suatu sampel yang besar, maka metode FEM lebih

sesuai untuk digunakan. Namun untuk memastikan penggunaan FEM, model akan diuji dengan menggunakan Hausman Test, sebagai berikut :

Tabel 1

Uji dengan metode *Hausman Test* pada model 1

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: VIEWSHSL01

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.865190	3	0.0197

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
TTB?	0.552483	0.778693	0.014647	0.0616
PAD?	0.075723	0.183737	0.002399	0.0274
POP?	0.940747	0.118840	0.082409	0.0042

Sumber : data diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dengan menggunakan distribusi *chi-square* nilai probabilitas pada test *cross section Random Effect* memperlihatkan angka bernilai 0.0197 yang berarti signifikan pada tingkat $\alpha = 5\%$ ($p\text{-value} < 0.05$). Maka dapat disimpulkan dari pengujian *Hausman Test*, model yang dipilih adalah FEM.

Model Pengaruh Transfer Tidak Bersyarat, Transfer Bersyarat, PAD dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tahun 2007-2010

Melalui pengujian *Hausman Test* pada model 2a didapat hasil sebagai berikut :

Tabel 2

Uji dengan metode *Hausman Test* pada model 2

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: VIEWSHSL02

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.040930	4	0.0005

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
TTB?	0.913509	0.923591	0.005742	0.8941
TB?	0.055586	0.013132	0.001377	0.2525
PAD?	0.110244	0.185114	0.000716	0.0052
AK?	1.498306	0.723414	0.094557	0.0117

Sumber : data diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dengan menggunakan distribusi *chi-square* nilai probabilitas pada test *cross section Random Effect* memperlihatkan angka bernilai 0.0005 yang berarti signifikan pada tingkat $\alpha = 1\%$ ($p\text{-value} < 0.01$). Maka dapat disimpulkan dari pengujian *Hausman Test*, model yang dipilih adalah FEM.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan korelasi parsial dengan indikator *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan ketentuan sebagai berikut :

- $0 < \text{VIF} <$, tidak terdapat multikolinearitas
- $\text{VIF} > 10$, terdapat multikolinearitas

Hasil pengujian terhadap model 1, model 2a dan model 2b sebagai berikut :

Tabel 3

Hasil Uji Multikolinearitas terhadap Model 1

Dimensi	Nilai R2	VIF	kesimpulan
TTB	0.337047	1.508403	Tidak terdapat multikolinearitas
PAD	0.446496	1.806672	Tidak terdapat multikolinearitas
POP	0.269129	1.368231	Tidak terdapat multikolinearitas

Sumber : uji multikolinearitas dengan indikator VIF model 1

Tabel 4

Hasil Uji Multikolinearitas terhadap Model 2

Dimensi	Nilai R2	VIF	kesimpulan
TTB	0.366093	1.577518	Tidak terdapat multikolinearitas
TB	0.314055	1.457843	Tidak terdapat multikolinearitas
PAD	0.507487	2.030403	Tidak terdapat multikolinearitas
AK	0.283966	1.396582	Tidak terdapat multikolinearitas

Sumber : uji multikolinearitas dengan indikator VIF model 2

Dari Tabel 3 dan Tabel 4 diketahui bahwa nilai VIF untuk keseluruhan dimensi berada di bawah 10. Dengan demikian tidak terjadi gejala multikolinieritas antara variabel-variabel bebas pada model 1 maupun model 2

Uji Heterokedastisitas

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan pengujian *White Heterokedasticity Test*, yang di dalam model panel disebut *White Heterokedasticity-Consistent Standard Error & Covariance*.

Pada Model 1, yaitu model pengaruh Transfer Tidak bersyarat, PAD dan Populasi terhadap Belanja Daerah disajikan sebagai berikut :

Tabel 5
Hasil Pengujian Heterokedastisitas terhadap model 1

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	2.639597	Prob. F(14,165)	0.0017
Obs*R-squared	32.93707	Prob. Chi-Square(14)	0.0029
Scaled explained SS	61.24641	Prob. Chi-Square(14)	0.0000

Sumber : Uji Heterokedastisitas dengan Metode *White* Model 1

Hasil output menunjukkan nilai *Obs*R-squared* adalah sebesar 32.93 sedangkan nilai *probabilitas (chi-square)* adalah 0,000 (lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$), dengan demikian kita tolak hipotesis nol, sehingga data mengandung masalah heteroskedastisitas.

Pada Model 2, yaitu model pengaruh Transfer Tidak bersyarat, Transfer Bersyarat, PAD dan Angkatan Kerja terhadap PDRB disajikan pada tabel 6 berikut :

Tabel 6
Hasil Pengujian Heterokedastisitas terhadap Model 2

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	2.639597	Prob. F(14,165)	0.0017
Obs*R-squared	32.93707	Prob. Chi-Square(14)	0.0029
Scaled explained SS	61.24641	Prob. Chi-Square(14)	0.0000

Sumber : Uji Heterokedastisitas dengan Metode *White* Model 2

Hasil output menunjukkan nilai *Obs*R-squared* adalah sebesar 32.93 sedangkan nilai *probabilitas (chi-square)* adalah 0,000 (lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$), dengan demikian kita tolak hipotesis nol, sehingga data mengandung masalah heteroskedastisitas.

Dalam *views 7.0* telah disediakan fasilitas untuk membebaskan regresi dari masalah heterokedastisitas, yakni dengan metode *white*. Selanjutnya, agar regresi pada model 1 dan 2a terbebas dari masalah heterokedastisitas maka digunakan metode *white*.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi residual satu observasi dengan observasi lainnya. Pengujian Autokorelasi

dilakukan salah satunya dengan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika nilai hitung > tabel atau dengan melihat langsung perbandingan probabilitas Chi-Square dengan tingkat signifikansi 1%, 5% dan 10%. Bila probabilitasnya > tingkat signifikansi maka tidak terjadi Autokorelasi.
- Jika nilai hitung < tabel atau dengan melihat langsung perbandingan probabilitas Chi-Square dengan tingkat signifikansi 1%, 5% dan 10%. Bila probabilitasnya < tingkat signifikansi maka terjadi Autokorelasi.

Hasil pengujian Autokorelasi terhadap model 1 dan model 2 adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Hasil Pengujian Autokorelasi terhadap Model 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.484436	Prob. F(2,174)	0.6169
Obs*R-squared	0.996730	Prob. Chi-Square(2)	0.6075

Sumber : Uji Autokorelasi dengan Metode *Breusch-Godfrey* Model 1

Analisa hasil output pada model 1 menunjukkan nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0,6075 lebih besar dari nilai signifikansi 10% sehingga H_0 diterima maka dapat disimpulkan model di atas bebas dari masalah Autokorelasi

Tabel 8
Hasil Pengujian Autokorelasi terhadap Model 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	14.16281	Prob. F(3,172)	0.0000
Obs*R-squared	35.65655	Prob. Chi-Square(3)	0.0000

Sumber : Uji Autokorelasi dengan Metode *Breusch-Godfrey* Model 2

Analisa hasil output pada model 2 menunjukkan nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0,0000 lebih kecil dari nilai signifikansi 1%, 5% dan 10% sehingga H_0 ditolak maka dapat disimpulkan model di atas terdapat masalah Autokorelasi..

Berdasarkan hasil pengujian, model 2 memiliki masalah Autokorelasi positif. Namun demikian model 2 merupakan model *Fixed Effect Model*, dimana dengan demikian tidak membutuhkan asumsi terbebasnya model dari serial Autokorelasi (Nachrowi dan Hardius Usman, 2006). Autokorelasi pada kedua model dapat diperkecil karena model-model tersebut diuji dengan metode *Pooled EGLS* (*cross-section weight*).

Persamaan regresi untuk model 1 didapat sebagai berikut :

$$\text{LnGit} = -8.874472 + 0.075723\text{LnPADit} + 0.552483\text{LnTTBit} + 0.940747\text{LnPOPit} + \text{Uit}$$

Dari regresi model 1 terlihat bahwa besaran koefisien yang ditunjukkan oleh Transfer Tidak bersyarat sebesar 0,552483 ternyata lebih besar daripada koefisien PAD yang sebesar 0,075723. Hal ini menunjukkan bahwa elastisitas Belanja Daerah terhadap Transfer Tidak Bersyarat lebih tinggi daripada elastisitas Belanja Daerah terhadap PAD dimana respon Belanja Daerah terhadap Transfer Tidak Bersyarat adalah lebih besar daripada respon Belanja Daerah terhadap PAD.

Dari hasil uji dengan menggunakan wald test pada persamaan model 1 diperoleh probabilitas sebesar 0,0753 lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar 10% sehingga H_0 ditolak artinya nilai koefisien PAD tidak sama dengan nilai koefisien Transfer Tidak Bersyarat.

Dari hasil estimasi model dan pengujian dengan metode *wald test* menunjukkan bahwa indikasi adanya *flypaper effect* pada pengaruh Transfer Tidak Bersyarat dan PAD terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan terbukti secara statistik melalui ekonometrik.

Persamaan regresi untuk model 2 didapat sebagai berikut :

$$\text{LnYit} = -16.03521 + 0.110244\text{LnPADit} + 0.913509\text{LnTTBit} + 0.055586\text{LnTBit} + 1.498306\text{LnAKit} + \epsilon_{it}$$

Probabilitas t-statistik yang ditunjukkan oleh variabel Transfer Tidak Bersyarat, PAD dan Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan. Sementara untuk Transfer Bersyarat probabilitas t-statistiknya tidak mempunyai pengaruh terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan.

Kesimpulan

1. Hasil pengujian melalui estimasi model yang menunjukkan koefisien Transfer Tidak Bersyarat terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan koefisien PAD terhadap Belanja Daerah dan hasil uji dengan wald test, memberi arti bahwa telah terjadi *flypaper effect* di empatpuluh lima Kabupaten/kota yang ada di Kalimantan selama periode 2007-2010. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/kota di Kalimantan cenderung sangat reaktif dan begitu mengharapkan dana dari pemerintah pusat ketimbang mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah seluas-luasnya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Adanya *flypaper effect* di kabupaten/Kota di Kalimantan juga menunjukkan bahwa telah terjadi inefisiensi belanja daerah yang bila terjadi secara terus menerus akan berdampak rendahnya kemajuan pembangunan ekonomi di daerah.
2. Variabel Transfer Tidak Bersyarat, PAD dan Angkatan Kerja baik secara parsial maupun bersama-sama positif dan signifikan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan periode tahun 2007-2010. Sementara variabel Transfer Bersyarat tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Saran

1. Melihat hasil penelitian ini dimana pada pada pengaruh Transfer Tidak Bersyarat dan PAD terhadap belanja daerah kabupaten/Kota di Kalimantan periode tahun 2007-2010 telah terjadi *flypaper effect*, maka merekomendasikan bagi pemerintah daerah ke depannya :
 - a) Mengalokasikan belanja daerah seefisien mungkin terutama pada program dan kegiatan dengan sektor-sektor yang lebih banyak menyentuh kepada kepentingan publik sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat setempat
 - b) Melihat daripada alokasi belanja modal di tahun 2010 yang hanya sebesar 30% nampaknya belum cukup untuk memberikan akses yang luas terutama dalam pembangunan infrastruktur agar dapat menunjang peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Kalimantan, maka sebaiknya dalam penganggaran dan pengalokasian pengeluaran berikutnya agar memberikan porsi yang lebih besar untuk belanja modal sedikitnya 50 % dari APBD.
 - c) Lebih mengoptimalkan potensi daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yaitu yang mana bisa dilakukan dengan cara: (1) intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak; (2) eksplorasi sumber daya alam; dan (3) skema pembentukan modal (*capital formation*) atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor sehingga dengan demikian ke depannya daerah bisa mandiri secara ekonomi yang pada akhirnya bisa lepas dari ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
2. Dengan mengetahui hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel-variabel keuangan daerah seperti Transfer Tidak Bersyarat, Transfer Bersyarat dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kabupaten/Kota di Kalimantan menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat penting terutama dalam mengalokasikan pengeluaran sehingga perlu disikapi dengan keseriusan pemerintah untuk mengalokasikan pengeluarannya tersebut sungguh-sungguh pada sektor dan proyek yang produktif dengan pengelolaan dan manajemen yang baik dan transparan.